

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tujuan dari setiap perusahaan pasti adalah untuk memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Semakin tinggi nilai laba yang dihasilkan semakin tinggi pula tingkat kemakmuran yang diperoleh para pemilik perusahaan. Tercapainya suatu tujuan atau target perusahaan dalam memperoleh laba yang maksimal tersebut menjadi tugas para pihak manajemen yang menjalankan kegiatan perusahaan sehari-harinya. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Oleh karena itu bagi pihak manajemen yang kinerjanya diukur berdasarkan atas kemampuannya menciptakan laba bagi perusahaan pasti berusaha menunjukkan kemampuannya dalam mencapai target tersebut. Namun adakalanya manajemen tidak mampu memenuhi target tersebut dan keadaan itu mendorong pihak manajemen

melakukan praktik manajemen laba. Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam penyusunan dan pelaporan keuangan perusahaan untuk menghasilkan laba yang sesuai laba yang diinginkannya Hamonangan Siallagan (2009 : 61). Tindakan manajemen laba ini menimbulkan beberapa kasus dalam pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain seperti PT. Kimia Farma Tbk dan PT. Bank Lippo Tbk. Pada PT. Kimia Farma Tbk, perusahaan ini diperkirakan melakukan *mark up* laba bersih dalam laporan keuangan pada tahun 2001. Kimia Farma menyebutkan berhasil memperoleh laba sebesar Rp 132 miliar. Namun, laba yang dilaporkan tersebut pada kenyataannya berbeda. Perusahaan farmasi ini pada tahun 2001 sebenarnya hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp 99 miliar. (Sumber : *Tempointeraktif.com*).

Sama halnya dengan kasus PT. Kimia Farma Tbk, kasus pada PT. Lippo Tbk pada tahun 2002, berawal dari diketahuinya manipulasi pada pelaporan keuangan yang telah dinyatakan “Wajar Tanpa Syarat”. Pada saat itu, laporan keuangan per 30 September 2002 Bank Lippo kepada publik bertanggal 28 November menyebutkan, total aktiva perseroan Rp 24 triliun dan laba bersih Rp 98 miliar. Namun dalam laporannya ke BEJ (sekarang BEI) bertanggal 27 Desember 2002, manajemen menyebutkan total aktiva berkurang menjadi Rp 22,8 triliun dan mengalami rugi bersih sebesar Rp 1,3 triliun. Padahal, dalam kedua laporan keuangan itu diakui telah diaudit. Manajemen beralasan, perbedaan laba bersih dalam dua laporan keuangan yang sama-sama dinyatakan diaudit itu terjadi karena adanya penurunan nilai agunan yang diambil alih (AYDA) dari Rp 2,393 triliun pada laporan publikasi dan Rp 1,42 triliun di laporan ke BEJ. Hal ini

mengakibatkan, dalam keseluruhan neraca terjadi penurunan rasio kecukupan modal (CAR) dari 24.77 persen menjadi 4,23 persen (*Sumber: Tempointeraktif.com*).

Manajemen laba dapat terjadi karena adanya asimetri informasi antara pihak manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan, hal ini dikarenakan selaku pengelola perusahaan, pihak manajemen memiliki informasi yang lebih dibanding pemilik. Richardson (1998) dalam Rahmawati dkk (2006) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara magnitud asimetri informasi dan tingkat manajemen laba. Fleksibilitas manajemen untuk memanajementi laba dapat dikuraingi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba. Asimetri informasi menyebabkan ketidakinginan investor untuk melakukan perdagangan saham serta menaikkan biaya modal sebagai bentuk proteksi harga atas kerugian dari perdagangan dengan partisipan pasar lain yang memiliki informasi lebih baik (Bhattacharya dan Spiegel 1991 dalam Rahmawati dkk 2006). Penelitian tersebut menggunakan *bid-ask spread* sebagai proksi atas asimetri informasi yang terjadi antara *market maker* (investor) dan pihak manajemen perusahaan.

Selain adanya asimetri informasi, pihak manajemen juga berupaya memanajementi laba dengan meminimalisasi beban-beban yang potensial. salah satunya adalah melakukan penghematan pada beban pajak perusahaan. Salah satu solusi melakukan penghematan tersebut adalah melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak terbagi menjadi dua cara yaitu dengan penyelundupan pajak dan penghindaran pajak. Penyelundupan pajak merupakan usaha mengurangi

beban pajak dengan cara melanggar undang-undang sedangkan penghindaran pajak adalah usaha mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, Usaha penghindaran pajak yang sukses disebut sebagai perencanaan pajak (Zain, 2007 : 48-49).

Dengan adanya perubahan peraturan pajak yang memberikan penurunan tarif pajak badan pada tahun 2009 dan 2010 maka peran perencanaan pajak akan menjadi lebih penting. Maxson dan Martini (2011) mengungkapkan bahwa perubahan tarif PPh badan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya. Salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk memperoleh keuntungan dari adanya perubahan tarif pajak badan ini adalah *tax shifting* yaitu dengan memindahkan laba tahun sebelum perubahan tarif pajak badan ke tahun sesudah perubahan tarif pajak. Menurut akuntansi hal ini dapat diterima karena akuntansi menganut prinsip akrual basis dimana pada dasarnya basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) yang dilakukan pada periode dimana seharusnya pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan waktu penerimaan/pengeluaran kas dari pendapatan/beban yang bersangkutan. Yin dan Cheng (2004) dalam Maxon dan Martini (2011) menguji pengaruh dari insentif pajak dan insentif non pajak terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam menanggapi perubahan tarif pajak di Amerika Serikat. Hasil penelitian Yin dan Cheng menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) lebih tertarik untuk mengurangi *discretionary accrual* untuk mendapatkan keuntungan perpajakan.

*Leverage* yang tinggi pada perusahaan juga merupakan dorongan bagi pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. *Leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh pihak luar atau kreditor. Brigham dan Watson (2001) dalam Soleman (2008) mendefinisikan *leverage* sebagai ukuran yang memperlihatkan sejauh mana perusahaan dalam membiayai aktivitya dengan menggunakan pembiayaan utang dalam struktur modal perusahaan membiayai kegiatan perusahaan. *Leverage* mampu mengukur tingkat risiko suatu perusahaan di masa depan, suatu informasi yang sangat mempengaruhi keputusan calon investor dalam membeli saham. Bagi investor saham, hutang mencerminkan risiko atas investasi. Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* tinggi akibat besarnya jumlah utang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam *default* yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. Semakin tinggi nilai *Leverage* maka semakin besar tingkat hutang yang harus dibayar perusahaan, dibandingkan dengan aset yang dimiliki untuk melunasinya. Tingginya tingkat hutang menimbulkan sebuah ketidakpastian bagi para investor akan *return* yang diperoleh atas modal yang ditanamkan. Hal ini dapat menyebabkan harga saham turun karena risiko bagi para investor meningkat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati dkk (2006) yang menguji hubungan informasi asimetri terhadap manajemen laba pada bank yang terdaftar di BEI. Keterbaruan penelitian ini adalah peneliti menguji pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sesuai

saran dari peneliti sebelumnya dan juga menggunakan tahun sampel 2008-2010 dengan tujuan agar data yang diambil sebagai sampel lebih mencerminkan kondisi pasar modal saat ini, sehingga hasil yang diperoleh juga dapat lebih relevan dengan kondisi pasar saat ini. Selain itu peneliti juga menggunakan metode pengukuran yang berbeda dari penelitian terdahulu pada manajemen laba. Peneliti juga mencoba menambahkan perencanaan pajak dan *Leverage* sebagai variabel dependen. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Informasi Asimetri, Perencanaan Pajak, dan *Leverage* Terhadap Manajemen Laba”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh adanya asimetri informasi terhadap manajemen laba?
2. Apakah terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba?
3. Apakah terdapat pengaruh *Leverage* terhadap manajemen laba?
4. Apakah terdapat pengaruh asimetri informasi, perencanaan pajak, dan *Leverage* terhadap manajemen laba?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh adanya asimetri informasi terhadap manajemen laba.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Leverage* terhadap manajemen laba.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh asimetri informasi, perencanaan pajak, dan *Leverage* terhadap manajemen laba.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu akuntansi, terutama dalam hal manajemen laba dan sebagai acuan peneliti bila melakukan penelitian serupa dikemudian hari.
2. Bagi Perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan manajemen laba perusahaannya.
3. Bagi Investor, sebagai dasar masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham agar dapat memperkecil risiko yang ditanggung.